

## **Adaptasi dan Perluasan *Dewey Decimal Classification* (DDC) untuk Notasi (Subjek) Indonesia**

**Suherman**

*Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh*

### **Abstrak**

Tulisan ini memaparkan cara-cara menentukan notasi DDC secara spesifik agar proses temu balik dokumen menjadi lebih efektif dan efisien. Selama ini sebagian dari kita mungkin beranggapan bahwa semakin panjang notasi maka akan semakin spesifik pula subjek suatu dokumen. Padahal ada cara khusus yang memungkinkan bahwa notasi yang lebih pendek pun dapat menunjukkan subjek yang lebih spesifik pula. Hal ini memang diberikan pilihan oleh DDC kepada pengkatalog untuk memilih selama dengan catatan memegang prinsip konsisten dalam penggunaannya. Paparan singkat diharapkan dapat membantu para pengkatalog terutama *Classifier* dalam menentukan notasi yang lebih singkat namun menunjukkan subjek yang lebih spesifik. Perluasan notasi di sini dikhususkan untuk wilayah Indonesia yang meliputi perluasan wilayah, bahasa dan sastra, bangsa/ras, perundang-undangan, administrasi dan pemerintahan serta subjek-subjek spesifik lainnya.

**Kata Kunci:** DDC, perluasan/adaptasi Indonesia

### **A. Pendahuluan**

Sebagaimana dimaklumi oleh sebagian besar pustakawan di seantero bumi bahwa salah satu sistem pengklasifikasian yang sangat populer adalah sistem pengklasifikasian dari Dewey (*Dewey Decimal Classification*). Sistem ini meskipun memiliki kekurangan dan kelemahannya masih tetap merupakan sistem klasifikasi umum dan paling banyak digunakan di perpustakaan-perpustakaan di seluruh dunia. Dibalik kepopulerannya sistem klasifikasi ini banyak diterjemahkan kedalam berbagai bahasa dan disesuaikan untuk berbagai keperluan di berbagai jenis lembaga pengelola informasi.

Ada banyak permasalahan yang dihadapi di Indonesia diantaranya adalah masalah bahasa yang juga dijadikan pada pembagian subjek yang berkaitan dengan Indonesia. Selain itu, ternyata untuk subjek-subjek berkaitan di luar Amerika Serikat dan Eropa Barat pun belum memberikan pembagian yang cukup mendetil. Permasalahan yang dihadapi para pustakawan dalam mengklasifikasikan bahan pustaka tentang Indonesia, dari koleksi setiap perpustakaan di Indonesia, yang perlu diorganisir dan disusun secara sistematis agar pemustaka benar-benar mudah menemukan koleksi secara cepat.

Bagian-bagian dari DDC yang menggunakan perluasan dan penyesuaian adalah sebagai berikut :

- Notasi wilayah Indonesia (-598) dari *Tabel-2*. Pembagian wilayah Indonesia diperluas sampai dengan kecamatan.
- Di bawah *Tabel-5* dan 6 ( bangsa dan bahasa) diberi petunjuk bagaimana menggunakan sehingga tidak perlu memperoleh angka panjang untuk hal-hal yang berhubungan dengan Indonesia dalam hal ini Bangsa dan Bahasa Indonesia.
- Adaptasi dan perluasan DDC seksi Islam, pada angka dasar 297
- Penyederhanaan klasifikasi karya hukum dan perundang-undang Indonesia (342-348)
- Adabtasi dan perluasan karya Administrasi Pemerintahan Pusat dan Daerah Indonesia (353-353.9)
- Adabtasi dan perluasan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah (410-419) dan kesusasteraan Indonesia dan kesusastraan Daerah (810-819)
- Angka-angka klasifikasi untuk subjek-subjek yang spesifik Indonesia, seperti Ideologi Pancasila, Hukum Adat, Majelis Permusyawaratan Rakyat dsb.

## **B. Adaptasi dan Perluasan Tabel**

### *1. Tabel-2 (Wilayah)*

DDC hanya mengadakan pembagian satu tahap menurut pulau-pulau besar dan kelompok-kelompok pulau tanpa mengikutsertakan Papua. Notasi dasar -598 harus kita pakai, tetapi selanjutnya dengan sendirinya perlu penyesuaian dan perluasan dengan memasukan Papua (-598 ) yang oleh DDC ditetapkan pada -951 6 dengan nama Papua.

Pembagian wilayah Indonesia diadakan dalam tiga tahap. Pembagian tahap pertama diadakan secara geografis menurut pulau-pulau dan kelompok pulau-pulau, dari barat ke timur : Sumatera, Jawa dan Madura, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua sesuai dengan kebiasaan DDC yang memberi notasi khusus pada tahap pertama (-598). Pembagian tahap kedua adalah menurut daerah administratif, daerah tingkat 1 provinsi. Tahap ke tiga juga menurut daerah administratif yang lain : kotamadya, kota administratif, kecamatan dan kelurahan. Termasuk pulau-pulau kecil, dimasukkan dalam kualifikasi kabupaten dimana wilayah tersebut berada.

Cara penggunaan Adabtasi dan perluasan wilayah (tabel 2), perlu dijelaskan bahwa angka-angka dalam tabel 2 ini tidak dipakai tersendiri, melainkan bila perlu tambahkan di belakang angka dari bagan (*schedule*) baik secara langsung bila dinyatakan demikian, atau melalui subdivisi standar 09 dari tabel 1, misalnya perpustakaan umum di Jakarta menjadi 027.459 822 (ada instruksi boleh langsung) sumber daya alam (333.7) di kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta, menjadi 333.709 598 257 (tidak ada intruksi boleh langsung). Dapat dilihat lebih rinci pada buku adaptasi dan perluasan notasi wilayah Indonesia menurut DDC.

## 2. Tabel-5 (Kelompok-kelompok Ras, Etnis, Bangsa)

Indonesia sebagai ras/bangsa berada pada notasi -992 2, namun menurut DDC, untuk memperoleh penekanan lokal (local emphasis) dan notasi yang singkat. Boleh menggunakan notasi -1: dalam hal yang demikian notasi untuk bangsa Amerika Utara yang mayoritasnya orang Inggris ditetapkan pada notasi -2

Ringkasan kelompok ras, etnis, nasional sebagai berikut :

- 1 [Amerika Utara]  
(diganti dengan Indonesia)
- 2 Anglo-saxon, Inggris
- 3 Nordik
- 4 Latin modern
- 5 Italia, Romania yang berkaitan
- 6 Spanyol & portugis
- 7 lain-lain yang italia
- 8 Yunani dan yang berkaitan
- 9 lain-lain ras, kelompok etnis dan nasional

Penerapan notasi *Tabel-5* dapat diadakan secara langsung, bila ada instruksi demikian, misalnya pada 155.84 etnopsikologi,

ada instruksi **Tambahkan notasi** -01-99 dari *Tabel-5* pada angka dasar 155.84. Sehingga *etnopsikologi* bangsa Indonesia menjadi 155.841 (tidak perlu angka panjang 155.849 922): atau kalau tidak ada, boleh melalui subdivisi standar -089 dari *Tabel-1*, misalnya seni keramik (738) bangsa Indonesia 738.089 1 (tidak perlu angka panjang 738.089 992 2 )

### 3. *Tabel-6* (Bahasa-Bahasa)

Bahasa Indonesia seharusnya notasi panjang -99221, namun boleh menggunakan notasi -1. Dalam hal demikian bahasa-bahasa Indo-Eropa ditetapkan pada -91.

Ringkasan *Tabel-6* bahasa ini adalah sebagai berikut.

- 1 *[Bahasa-bahasa Indo-Eropa]*
- 2 *Bahasa Inggris & Anglo-Saxon*
- 3 *Bahasa Jerman (Teutonik)*
- 4 *Bahasa Prancis (Romence)*
- 5 *Bahasa Italia*
- 6 *Bahasa Spanyol & portugis*
- 7 *Bahasa Latin (Italic)*
- 8 *Bahasa Hellenik (Yunani)*
- 9 *Bahasa Lain-lain*

Penerapan notasi dari *Tabel-6* diadakan pada angka-angka dari bagan ataupun dari tabel hanya bila ada instruksi khusus. Contoh: 031 untuk Ensiklopedi umum Indonesia (bukan 039.992 21), 051 untuk majalah umum Bahasa Indonesia (bukan 059.992 21)

## C. Adaptasi dan Perluasan pada Bagan

### 1. Klasifikasi Agama Islam

Perkembangan literatur dalam bidang agama khususnya agama Islam cukup besar, sehingga diperlukan suatu sistem pengolahan bahan perpustakaan yang baku, seragam dan taat azas. Dalam DDC edisi-22, kelas agama Islam menempati seksi (297) yang sangat kecil dan terbatas.

Dalam praktek adaptasi dan perluasan notasi untuk seksi Islam ini, berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 159 tahun 1987 menetapkan angka dasar seksi Islam adalah 2X0 dan untuk

perpustakaan Nasional RI menetapkan angka dasar seksi Islam (297).

Adaptasi dan perluasan notasi Islam untuk perpustakaan Nasional RI menetapkan 297, kemudian secara rinci notasi Islam dapat dirinci dalam ringkasan di bawah ini.

*297 Islam*

- .1 Al-Qur'an dan Ilmu yang berkaitan*
- .2 Hadis dan Ilmu yang berkaitan*
- .3 Aqid dan Ilmu Kalam*
- .4 Fiqih*
- .5 Akhlak dan Tasawuf*
- .6 Sosial dan Budaya*
- .7 Perkembangan*
- .8 Aliran dan Sekte*
- .9 Sejarah Islam dan Biografi*

Penerapan dan penggunaan instruksi yang ada dalam bagan juga mengikuti sistem yang ada dalam DDC. Perluasan Klasifikasi tersebut dapat dilihat pada Tajuk Subjek dan Klasifikasi Agama Islam. Sebagai contoh adalah sebagai berikut:

- 2X0 = Islam (Umum)*
- 2X1 = Al-Quran dan ilmu yang berkaitan*
- 2X2 = Hadis dan ilmu yang berkaitan*
- 2X3 = Aqid dan Ilmu Kalam*
- 2X4 = Fiqih*
- 2X5 = Akhlak dan Tasawuf*
- 2X6 = Sosial dan Budaya*
- 2X7 = Filasafat dan Perkembangan*
- 2X8 = Aliran dan Sekte*
- 2X9 = Sejarah Islam dan Biografi*

## 2. Klasifikasi Karya Hukum Indonesia

Untuk Klasifikasi Hukum dan Perundang-undangan. DDC memberikan beberapa Alternatif. Angka-angka Klasifikasi untuk cabang-cabang hukum (kecuali hukum internasional) dibentuk berdasarkan 4 (empat) unsur terpisah.

*Pertama*, 34 sebagai notasi dasar untuk hukum.

*Kedua*, suatu digit yang menunjuk pada cabang hukum tertentu seperti :

- 2 *Konstitusi dan hukum tata negara (hukum administratif)*
- 3 *Aneka ragam hukum publik*
- 4 *Hukum sosial*
- 5 *Hukum pidana*
- 6 *Hukum perdata (privat)*
- 7 *Hukum acara, Pengadilan*

*Ketiga*, suatu kelompok digit didahului oleh angka 0, menunjuk pada topik yang merupakan bagian dari cabang hukum tertentu, misalnya -05 pada cabang hukum pidana adalah acara pidana, -07 pada cabang hukum perdata adalah hukum dagang.

*Keempat*, suatu notasi wilayah *Tabel-2* untuk menunjuk pada yuridiksi atau tempat misalnya 42 untuk Inggris.

Berdasarkan empat unsur tersebut pembentukan notasi hukum. Bagi mereka yang ingin memperoleh secara khusus karya hukum dari yuridiksi atau wilayah tertentu dipilih kombinasi 1 s.d 4 berarti notasi dasar 34, disusul digit dengan notasi wilayah, misalnya 42 untuk Inggris, dan akhirnya digit untuk topik khusus hukum perdata yang didahului dengan 0, misalnya 07 hukum dagang, sehingga klasifikasi hukum dagang Inggris menjadi 346.4207

Untuk karya hukum di Indonesia, para pengasuh/editor DDC merekomendasikan suatu penyederhanaan dalam penggolongan karya hukum di negara tertentu. Untuk maksud itu disarankan agar angka "wilayah" dari *tabel-2* tidak perlu ditambahkan pada angka klasifikasi karya hukum yuridiksi bersangkutan. Misalnya di perpustakaan Indonesia maka Hukum Perdata Indonesia cukup dengan notasi 346, tidak perlu 346.598, jadi hukum perdata Indonesia 346.07, tidak perlu angka panjang 346.598 07. Dengan demikian cabang-cabang hukum Indonesia menjadi:

- 342 *Konstitusi dan Hukum tata Negara Indonesia*
- 343 *Aneka ragam Hukum Publik Indonesia*
- 344 *Hukum Sosial Indonesia*
- 345 *Hukum Pidana Indonesia*
- 346 *Hukum Perdata Indonesia*
- 347 *Hukum Acara Pengadilan di Indonesia*

Contoh :

342.02	<i>Undang-undang Dasar Indonesia</i>
342.04	<i>Hukum Perpajakan Indonesia</i>
344.01	<i>Hukum Perburuhan Indonesia</i>
345.05	<i>Hukum Acara Pidana Indonesia</i>
346.08	<i>Hukum Perbankan dan Asuransi Indonesia</i>
347.03	<i>Pengadilan tingkat banding di Indonesia</i>

Sehubungan dengan cara tersebut, hukum perbandingan (*Comparative law*) harus digolongkan dalam 349. Untuk menerapkannya, tambahkan pada angka dasar 349, angka-angka yang mengikuti 34 dalam 345-348 misalnya :

<i>Hukum acara pidana perbandigan</i>	349.505
<i>Hukum acara pidana Australia</i>	349.594 05

### 3. Klasifikasi Pemerintahan Indonesia

Untuk mengklasifikasikan karya-karya tentang pemerintah pusat di Indonesia, DDC memberi angka dasar 354 ditambah angka wilayah, menjadi 354.598, suatu angka yang sudah cukup panjang dibanding dengan 353 untuk notasi karya pemerintah pusat Amerika Serikat. Namun di bawah notasi 353 lagi-lagi diberi catatan bahwa boleh dipakai untuk karya pemerintah pusat negara lain di luar Amerika Serikat. Berarti di Indonesia 353 dapat dipakai untuk karya tentang pemerintah pusat Indonesia. Untuk memudahkan pemakainya dalam klasifikasi ini dilengkapi dengan pembagian-pembagian yang diperlukan. Klasifikasi untuk departemen-departemen pemerintah pusat (353.1-353.8) oleh Perpustakaan Nasional telah dibuatkan pembagiannya secara ringkas sebagai berikut:

353.	<i>Administrasi Pemerintah Pusat Indonesia</i>
001	<i>Manajemen personalia</i>
002	<i>Daftar pejabat dan karyawan</i>
003	<i>Ujian dinas</i>
004	<i>Angkatan kerja pemerintah</i>
005	<i>Pensiunan</i>
006	<i>Lain-lain kegiatan administratif</i>
007	<i>Perlengkapan dan pengolahan dokumen</i>
008	<i>Administrasi badan-badan pengawas kegiatan-kegiatan khusus</i>

009 *Kegiatan penyalahgunaan wewenang pemerintah dan koreksinya*

Pembagian yang diperlukan klasifikasi untuk departemen-departemen dalam pemerintah pusat (353.1-353.8), sedangkan administrasi pemerintahan daerah di Indonesia digolongkan pada 353.9. Penerapan untuk pembagian menurut daerah terdapat 353.959 81-353.959 88, tambahkan pada angka dasar 353.9 angka wilayah -5981-598 8 dari *tabel-2*, misalnya pemerintah daerah propinsi Riau 353.959 814; pemerintah kabupaten Karawang 353.959 8 232 6.

4. Klasifikasi Bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah di Indonesia

Untuk klasifikasi bahasa digolongkan pada golongan 400 Bahasa dan Linguistik. Untuk karya mengenai bahasa secara komprehensif mengenai bahasa dan kesusasteraan dipakai 400.1-400.9 untuk subdivisi standar, 401-409 untuk linguistik. Sedangkan penetapan Bahasa Indonesia menggunakan 410, menggantikan Linguistik, pada DDC- 23.

Untuk klasifikasi bahasa daerah di Indonesia ditetapkan 419, secara ringkas sebagai berikut:

- 419 *Bahasa daerah & Bahasa Indonesia Lama ( melayu)*
- .1 *Bahasa-bahasa di Sumatera*
  - .2 *Bahasa-bahasa di Jawa*
  - .3 *Bahasa-bahasa di Kalimantan*
  - .4 *Bahasa-bahasa di Bali, Nusa Tenggara dan Timor Timur*
  - .6 *Bahasa-bahasa di Sulawesi*
  - .7 *Bahasa-bahasa di Maluku*
  - .8 *Bahasa- Bahasa di Papua*
  - .9 *Bahasa-bahasa Indonesia Lama (Bahasa Melayu)*

Pembagian pada bahasa Indonesia 411-418 dapat diterapkan pada bahasa-bahasa daerah 419.1-419.9, misalnya Etimologi bahasa-bahasa di Sumatera 419.12, Kamus bahasa-bahasa Kalimantan 419.43.

5. Klasifikasi Kesusasteraan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah



Pembagian notasi kesusteraan Indonesia ini pada 810, menggantikan notasi (*American literatur in English*). Secara ringkas pembagian notasi kesusteraan Indonesia sebagai berikut :

- 810 *Kesusasteraan Indonesia*
- 811 *Puisi*
- 812 *Drama*
- 813 *Fiksi*
- 814 *Esai*
- 815 *Pidato*
- 816 *Surat-surat*
- 817 *Satir (sindiran) dan humor (kejenaakaan)*
- 818 *Aneka ragam*

Pembagian pada kesusasteraan Indonesia 811-818 dapat diterapkan pada kesusasteraan bahasa daerah, misalnya puisi kesusasteraan bahasa-bahasa di Sumatera 819.11. Drama kesusasteraan bahasa-bahasa di Kalimantan 819.42.

Untuk klafikasi kesusasteraan daerah di Indonesia ditetapkan 819, secara ringkas sebagai berikut :

- 819 *Kesusasteraan bahasa daerah & Bahasa Indonesia lama (Melayu)*
  - .1 *Kesusasteraan Bahasa-bahasa di Sumatera*
  - .2 *Kesusasteraan Bahasa-bahasa di Jawa*
  - .3 *Kesusasteraan Bahasa-bahasa di Kalimantan*
  - .4 *Kesusasteraan Bahasa-bahasa di Bali, Nusa Tenggara dan Timor Timur*
  - .6 *Kesusasteraan Bahasa-bahasa di Sulawesi*
  - .7 *Kesusasteraan Bahasa-bahasa di Maluku*
  - .8 *Kesusasteraan Bahasa-bahasa Indonesia Lama (Bahasa Melayu)*

#### **D. Subjek Khas Indonesia**

Subjek khas Indonesia adalah subjek yang secara tegas tidak terdapat dalam bagan klafikasi maupun dalam indeksinya. Secara teoritis tempat subjek-subjek itu dalam klasifikasi harus ada. Namun karena literatur dalam subjek-subjek makin bertambah banyak perlu diadakan pemisahan dengan subjek yang lebih umum.

Pada prinsipnya tidak diperkenankan membentuk angka sendiri dengan menambah digit di belakang angka tertentu atau menggunakan angka yang belum dipakai, kecuali ada catatan yang membolehkannya. Misalnya, hukum adat tidak terdapat dalam DDC. Namun menurut teori tempat yang paling cocok adalah 340.5 (*system of law*). 340.52-340.59 telah dipakai untuk sistem-sistem hukum tertentu yang tidak cocok untuk hukum adat.

Demikian juga halnya dengan subjek Pancasila dan yang berhubungan dengan Pancasila. Misalnya Pendidikan Moral Pancasila, Demokrasi Pancasila dan sebagainya. Kita ketahui Pancasila adalah falsafah/ideologi Negara Republik Indonesia.

Berikut adalah ringkasan Tabel untuk subjek-subjek khas Indonesia berdasarkan versi Perpustakaan Nasional RI:

340.5A	<i>Hukum Adat</i>
320.5P	<i>Pancasila, Ideologi Negara Republik Indonesia</i>
321.8P	<i>Demokrasi Pancasila</i>
328.MPR	<i>Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia</i>
328.3DPR	<i>Dewan Perwakilan Rakyat</i>
335.P	<i>Sosialisme Pancasila</i>
370.114 P	<i>Pendidikan Moral Pancasila</i>

## E. Notasi Karya Biografi

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk dapat membentuk notasi karya biografi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk karya biografi perorangan, ditetapkan pada notasi dasar 92- ditambah dengan kata utama nama orang dalam tanda kurung.  
Contoh : 92 (*Amien*) = *Biografi Amien Rais*  
          92 (*Soekarno*) = *Biografi Soekarno*  
          926 = *Biografi teknokrat*  
          923.2 = *Biografi politikus*
2. Notasi untuk biografi dalam subjek tertentu, ditetapkan pada notasi subjek dengan notasi tambahan biografi '-092' dari *Tabel-2*.  
Contoh : 020.92 = *Biografi pustakawan*  
          540.92 = *Biografi ahli kimia*
3. Notasi untuk biografi dalam wilayah tertentu ditetapkan pada notasi dasar 920.03 -09 ditambah notasi tambahan wilayah dari *Tabel-2* DDC.

Contoh : 920.598 = *Biografi orang Indonesia*

920.55 = *Biografi orang Iran*

## F. Penutup

Sesuatu yang penting diingat oleh seorang pustakawan dalam menetapkan notasi suatu subjek adalah konsistensi agar tidak terjadi kebingungan baik dari pemakai ataupun pustakawan sendiri. Pustakawan sebaiknya mempunyai catatan khusus (pedoman) yang dapat digunakan oleh pustakawan bagian pengolahan karena pustakawan biasanya selalu di rotasi dari satu bagian ke bagian yang lain sehingga siapapun yang menangani klasifikasi di suatu perpustakaan tetap dapat mempedomani aturan klasifikasi yang telah ditetapkan bersama. Sebagai penutup berikut diberikan perbandingan notasi untuk subjek (notasi) Indonesia.

*Tabel Perbandingan Notasi untuk Notasi Indonesia berdasarkan DDC-23*

	Bagan (400/ bahasa)	Bagan (800/ sastra)	T-2 (wilayah)	T-5 (suku,ras)	T-6 (bahasa)
Indonesia	499.221	899.221	-598	-9922	-992 21
Sumatera			-598 1	-992 224 (Melayu)	-992 224 (Melayu)
Aceh	499.224 2	899.224 2	-598 11	-992 242 (Aceh)	-992 242 (Aceh)
Sumatera Utara			-598 12	-992 224 (Melayu)	-992 224 (Melayu)
Sumatera Utara	499.224 62	899.224 62	-598 12	-992 246 2 (Batak Toba))	-992 246 2 (Batak Toba)
Sumatera Utara	499.224 66	899.224 66	-598 12	-992 246 6 (Batak Dairi)	-992 246 6 (Batak Dairi)
Sumatera Barat	499.224 4	899.224 4	-598 13	-992 244 (Minang)	-992 244 (Minang)
Riau			-598 14	-992 224 (Melayu)	-992 224 (Melayu)
Jambi			-598 15		
Sumatra Selatan			-598 16		
Bengkulu			-598 17		
Lampung	499.224 8	899.224 8	-598 18	-992 248	-992 248
Kepulauan Riau			-598 192	-992 224 (Melayu)	-992 224 (Melayu)
Bangka Belitung			598 196		

Jawa dan Pulau sekitar	499.222	899.222	-598 2	-992 22 (Jawa)	-992 22 (Jawa)
Madura	499.223 4	899.223 4	-598 2	-92 234 (Madura)	-992 234 (Madura)
Jakarta			-598 22		
Banten			-598 23		
Jawa Barat	499.223 2	899.223 2	-598 24	-992 232 (Sunda)	-992 232 (Sunda)
Jawa Tengah	499.222	899.222	-598 26	-992 22 (Jawa)	-992 22 (Jawa)
Yogyakarta	499.222	899.222	-598 27	-992 22 (Jawa)	-992 22 (Jawa)
Jawa Timur	499.222	899.222	-598 28	-992 22 (Jawa)	-992 22 (Jawa)
Kalimantan			-598 3	-992 25	-992 25
Kalimantan Barat			-598 32		
Kalimantan Tengah			-598 34		
Kalimantan Selatan	499.225 6	899.225 6	-598 36	-992 256 (Banjar)	-992 256 (Banjar)
Kalimantan Timur			-598 38		
Sulawesi			-598 4	-992 26	-992 26
Sulawesi Utara			-598 42		
Gorontalo			-598 43		
Sulawesi Tengah			-598 34		
Sulawesi Barat			-598 46		
Sulawesi Selatan	499.226 2	899.226 2	-598 47	-992 262 (Bugis)	-992 262 (Bugis)
	499.226 4	899.226 4		-992 264 (Makasar)	-992 264 (Makasar)
SulTenggara			-598 48		
Maluku			-598 52		
Maluku Utara			-598 56		
Nusa Tenggara			-598 6		
Bali	499.223 8	899.223 8	-598 62	-992 238	-992 238
NTB			-598 65		
NTT			-598 67		

## F. Daftar Pustaka

Departemen Agama RI, Daftar Tajuk Subjek Islam dan Sistem Klasifikasi Islam: adaptasi dan perluasan DDC seksi Islam, penyunting Muh. Kailani, Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Puslitbang Lektur Agama, 1998/1999.

Dewey, Melvil, *Dewey Decimal Classification and Relative Index*, Ed.23 edited by Joan S. Mitchell, Dublin: OCLC, Ohio, 2011.

\_\_\_\_\_, *Dewey Decimal Classification and Relative Index*, Ed. 22 edited by Joan S. Mitchell, Dublin: OCLC, Ohio, 2006.

Perpustakaan Nasional RI, *Panduan Klasifikasi di Perpustakaan Nasional RI*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2007.

\_\_\_\_\_, *Terjemahan Ringkasan Klasifikasi Desimal Dewey dan Indeks Relatif: disesuaikan dengan DDC 20*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 1994.

Zulfikar Zein, *Buku Kerja Dewey Decimal Classification (DDC-22)*, Jakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2004.